

**ABSTRAK**

Ch. Rapih Noviriana. 2002. *Masa Pemerintahan Kabinet Karya (1957-1959)*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul *Masa Pemerintahan Kabinet Karya (1957-1959)* ini memuat tiga pokok permasalahan: (1) proses terbentuknya Kabinet Karya, (2) proses pelaksanaan program kerja Kabinet Karya, dan (3) akhir pemerintahan Kabinet Karya.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa Kabinet Karya merupakan kabinet yang paling lama memerintah di Indonesia selama penerapan Demokrasi Parlementer. Diketahui juga bahwa kabinet ini dibentuk pada saat negara dalam keadaan darurat perang. Formatur yang ditunjuk untuk membentuk kabinet ini adalah Soewirjo (PNI). Sayangnya Soewirjo tidak berhasil dalam usahanya tersebut. Oleh karena itu Sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet yang terdiri dari orang-orang non partai.

Dalam melaksanakan tugasnya, kabinet ini menyusun lima program kerja yang disebut Panca Karya, yaitu: (1) membentuk Dewan Nasional, (2) normalisasi keadaan republik, (3) melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar, (4) memperjuangkan Irian Barat, dan (5) mempergiat pembangunan.

Dalam masa pemerintahannya Kabinet Karya harus menghadapi situasi Indonesia yang kacau. Stabilitas nasional yang cukup kondusif untuk melaksanakan program kerjanya dengan baik dan lancarpun belum tercipta. Meskipun demikian ada beberapa hasil yang dapat dicapai oleh Kabinet Karya selama masa pemerintahannya. Misalnya pembangunan pabrik urea di Palembang, pembangunan beberapa sarana infrastruktur, dan mengeluarkan beberapa undang-undang ekonomi.

Sayangnya, sebelum mencapai hasil yang diharapkan, presiden mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Kabinet Karya mulai menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia pada tanggal 9 April 1957. Pada tanggal 6 Juli 1959 Kabinet Karya mengembalikan mandatnya kepada presiden. Penyerahan mandat ini terjadi satu hari setelah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menandai berakhirnya sistem kabinet parlementer di Indonesia.

ABSTRACT

Ch. Rapih Noviriana. 2002. *The Government Period of the Kabinet Karya (1957-1959)*. Sanata Dharma University. Yogyakarta.

This is a study on *The Government Period of Kabinet Karya (1957-1959)*. The three problems elaborated here were: (1) the process of forming the Kabinet Karya, (2) the process of conducting the programme of the Kabinet Karya, and (3) the ending of the Kabinet Karya.

This was a library research. The research showed that the Kabinet Karya performed the longest period of governing the nation during the implementation of the parliamentary democracy in Indonesia. The cabinet was formed when the country was in a state of emergency. Soewirjo (PNI) was elected the formateur of the cabinet. Unfortunately he could not do the task successfully. Sukarno then appointed he himself as the formateur and successfully formed the cabinet consisting the non parties as members.

This cabinet arranged five programmes called the Panca Karya (the five plans of work), i.e. (1) forming the Dewan Nasional (the National Representative Council), (2) normalize the situation of republic, (3) continuing the renunciation of the Konferensi Meja Bundar (the Round Table Conference), (4) fighting (to regain) West New Guinea, and (5) activating the development.

The Kabinet Karya administered the development when Indonesia was in a chaos situation. The National stability were needed to accelerate the development had not been established, yet the Kabinet Karya could perform some success during the government period. To mention some were the establishment of urea-based fertilizer factory in Palembang, the development of some means of infrastructure, and issued some economic regulations.

Unfortunately, before the cabinet reached the goal, the president issued the decree on July 5, 1959. The Kabinet Karya started the government period in Indonesia on April 9, 1957. On July 6, 1959, a day after the announcement of the Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (the decree of July 5, 1959)- the moment of the end of the parliamentary cabinet in Indonesia-, the Kabinet karya returned the mandate to the president.